# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1. Landasan Teori

### 2.1.1. *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkane keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda [22]. *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*suitanable economic development*) [23]

Perusahaan disamping memiliki tujuan sebagai lembaga yang berorientasi kepada pencapaian keuntungan, juga memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pihak tertentu yang harus dipenuhi. Pemenuhan tanggung jawab sosial ini akan berpengaruh terhadap kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, dalam jangka panjang akan diabaikan oleh lingkungannya, atau bahkan dapat berakibat fatal terhadap keamanan perusahaan, dan terhadap kenyamanan bekerja pada karyawannya [24].

Tanggung jawab sosial menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial bisa tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan kadang-kadang bertentangan dengan sasaran maksimisasi kekayaan [25]

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah: [26]

1. Diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development)* yang mendorong munculnya laporan berkelanjutan (*sustainability report)* dengan menggunakan *triple bottom line* (*Profit-People-Planet* atau “3P”)
2. Perubahan orientasi *Corporate Social Responsibility* dari suatu kegiatan yang bersifat sukarela

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

3. Adanya adopsi terhadap konsep *corporate citizenship* (kewargaan perusahaan)

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* adalah: [26]

1. Peningkatan penjualan dan *market share*
2. Memperkuat *brand positioning*
3. Meningkatkan citra perusahaan
4. Menurunkan biaya operasi
5. Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analis keuangan.

Tujuan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah: [27]

1. Untuk mematuhi berbagai peraturan yang berlaku
2. Memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di masa depan
3. Menjunjung tinggi etika bisnis
4. Terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas dan lingkungan sekitarnya.

Indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada penelitian ini adalah menurut *Sustainability Reporting Guidelines* tahun 2015 yang mengacu pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Indikator GRI terdiri 91 item pengungkapan fokus pengungkapan, yaitu *economic, environment, social, labour practices, human rights, society,* dan *product responsibility* sebagai dasar *sustainability reporting*.

GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Penjelasan masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 91 Indikator Berdasarkan GRI-G4**

| | | |
|---|---|---|
| Kategori Ekonomi | | |
| Kinerja Ekonomi | EC 1 | Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan |
| | EC 2 | Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim |
| | EC 3 | Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti |
| | EC 4 | Bantuan financial yang diterima dari pemerintah |
| Keberadaan Pasar | EC 5 | Rasio upah standar pegawai pemula (entry level)menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan |
| | EC 6 | Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan |
| Dampak Ekonomi Tidak Langsung | EC 7 | Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan |
| | EC 8 | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak |
| Praktek Pengadaan | EC 9 | Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan |
| Kategori Lingkungan | | |
| Bahan | EN 1 | Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume |
| | EN 2 | Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang |
| Energi | EN 3 | Konsumsi energi dalam organisasi |
| | EN 4 | Konsumsi energi diluar organisasi |
| | EN 5 | Intensitas Energi |
| | EN 6 | Pengurangan konsumsi energi |
| Air | EN 7 | Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa |
| | EN 8 | Total pengambilan air berdasarkan sumber |
| | EN 9 | Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air |
| | EN 10 | Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali |
| Keanekaragaman Hayati | EN 11 | Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung |
| | EN 12 | Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung |
| | EN 13 | Habitat yang dilindungi dan dipulihkan |
| | EN 14 | Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan |
| Emisi | EN 15 | Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1) |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.1 Sambungan**

| | | |
|---|---|---|
| | EN 16 | Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2) |
| | EN 17 | Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3) |
| | EN 18 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) |
| | EN 19 | Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) |
| | EN 20 | Emisi bahan perusak ozon (BPO) |
| | EN 21 | NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya |
| Efluen dan Limbah | EN 22 | Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan |
| | EN 23 | Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan |
| | EN 24 | Jumlah dan volume total tumpahan signifikan |
| | EN 25 | Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional |
| | EN 26 | Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi |
| Produk dan Jasa | EN 27 | Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk dan jasa |
| | EN 28 | Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori |
| Kepatuhan | EN 29 | Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan |
| Transportasi | EN 30 | Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja |
| Lain-lain | EN 31 | Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis |
| Asesmen Pemasok Atas Lingkungan | EN 32 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan |
| | EN 33 | Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan | EN 34 | Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi |
| Kategori Sosial Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan Bekerja | | |
| Kepegawaian | LA 1 | Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah |
| | LA 2 | Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan |
| | LA 3 | Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.1 Sambungan**

| | | |
|---|---|---|
| | LA 4 | Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV | LA 5 | Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja |
| | LA 6 | Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender |
| | LA 7 | Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka |
| | LA 8 | Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja |
| Pelatihan dan Pendidikan | LA 9 | Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan |
| | LA 10 | Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti |
| | LA 11 | Persentase karyawan yang menerima reviuw kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan |
| Keberagaman dan Kesetaraan Peluang | LA 12 | Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya |
| Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki | LA 13 | Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkanlokasi operasional yang signifikan |
| Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan | LA 14 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan |
| | LA 15 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaandalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| | LA 16 | Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan,ditangani,dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi |
| Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia | | |
| Investasi | HR 1 | Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia |
| | HR 2 | Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih |
| Non-Diskriminasi | HR 3 | Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.1 Sambungan**

| | | |
|---|---|---|
| Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama | HR 4 | Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut |
| Pekerja Anak | HR 5 | Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif |
| Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja | HR 6 | Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja |
| Praktik Pengamanan | HR 7 | Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi |
| Hak Adat | HR 8 | Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil |
| Asesmen | HR 9 | Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia |
| Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia | HR 10 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia |
| | HR 11 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia | HR 12 | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal |
| Sub-Kategori: Masyarakat | | |
| Masyarakat Lokal | SO 1 | Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan |
| | SO 2 | Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal |
| Anti-Korupsi | SO 3 | Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi |
| | SO 4 | Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi |
| | SO 5 | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil |
| Kebijakan Publik | SO 6 | Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat |
| Anti Persaingan | SO 7 | Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya |
| Kepatuhan | SO 8 | Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan |
| Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat | SO 9 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.1 Sambungan**

| | | |
|---|---|---|
| | SO 10 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil |
| Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyakat | SO 11 | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi |
| Sub-Kategori: Tanggungjawab Atas Produk | | |
| Kesehatan Keselamatan Pelanggan | PR 1 | Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan |
| | PR 2 | Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil |
| Pelabelan Produk dan Jasa | PR 3 | Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis |
| | PR 4 | Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil |
| | PR 5 | Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan |
| Komunikasi Pemasaran | PR 6 | Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan |
| | PR 7 | Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil |
| Privasi Pelanggan | PR 8 | Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan |
| Kepatuhan | PR 9 | Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa |

Apabila item informasi diungkapkan dalam laporan tahunan maka akan diberi skor 1, sedangkan apabila item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Perhitungan Indeks Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di rumuskan sebagai berikut [28]:

$$\text{Pengungkapan } \textit{corporate social responsibility} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{91} \quad (2.1)$$

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

### 2.1.2. *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham [5]. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparancy, accountability* dan *responsibility* [29]. Setidaknya ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance,* yaitu sebagai berikut [30]:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor dosmetik maupun international.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telat taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan pengguna asset perusahaan
5. Mengurangi korupsi *corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan

Tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) [29].

#### 2.1.2.1.Kepemilikan Intitusional

Kepemilikan institutional adalah persentase kepemilikan saham luar (non manajemen) atas saham perusahaan seperti bank, asuransi, atau institusi lain. Kepemilikan institusional yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dengan persentase (%) [31].

Keberadaan kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga akan mengontrol manajer untuk tidak

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* [32].

Kontrol yang efektif dari investor institusional telah mengambil alih peranan hutang sebagai alat kontrol manajemen, sehingga menyebabkan penggunaan hutang menurun. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut [32] :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \text{X } 100\% \quad (2.2)$$

**2.1.2.2.Komisaris Independen**

Keberadaan komisaris independen juga telah diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa untuk perusahan yang *listing* di BEI harus mempunyai jumlah komisaris independen 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang [33] :

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Persyaratan pengangkatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut [33]:

1. Bukan karyawan atau memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan emiten minimal 6 bulan;
2. Tidak memiliki saham di emiten baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi (lihat pengertian afiliasi dalam Pasal 1 UU Pasar Modal), dengan Emiten, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Emiten

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

4. Tidak melakukan hubungan bisnis dengan emiten baik secara langsung maupung tidak langsung.

Indikator komisaris independen dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota komisaris independen di laporan tahunan perusahaan pertambangan sebagai berikut :

Komisaris independen = jumlah komisaris independen (2.3)

**2.1.2.3.Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya [34]. Komite audit adalah suatu badan yang dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas [35].

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat teratasi.

Tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Komite audit memiliki wewenang, yaitu [36] :

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
3. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan;
4. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal [37]

Indikator komite audit dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan sebagai berikut :

Komite audit = jumlah anggota komite audit (2.4)

### 2.1.2. Kualitas Audit

Kualitas audit (*audit quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut [38].

Kualitas audit sebagai kemungkinan *(probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansi [39].Kebutuhan audit cukup besar karena banyak pemakai yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan akan menunjuk auditor untuk

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

meyakinkan pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Auditor bertanggungjawab penuh secara legal atas pekerjaannya yang meyakinkan bahwa informasi tersebut andal. Untuk itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan [40]. Auditor memiliki kepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan, maka untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit, auditor membutuhkan suatu kriteria dan Standar Profesional Akuntan Publik merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing [40].

Para akuntan publik mendapat lisensi dari negara bagian tempat mereka berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar terhadap mereka dari organisasi profesi nasional, yaitu *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). AICPA juga mempromosikan profesi akuntansi melalui kampanye iklan nasional, mengajukan jasa assurance baru, serta mengembangkan sertifikasi spesialis untuk membantu memasarkan dan memastikan kualitas jasa dalam berbagai bidang praktik yang terspesialisasi [41].

Kantor akuntan publik (KAP) internasional dikenal dengan julukan "*The Big Four*" dimana masing-masing kantor akuntan publik (KAP) internasional memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan mitra KAP Internasional *Big Four* dengan KAP di Indonesia :

**Tabel 2.2 Kantor Akuntan Publik (KAP)**

| The Big Four | Mitra Indonesia |
|---|---|
| *Deloitte Touche Tohmatsu* | Osman, Bing, Satrio dan rekan |
| *Ernst and Young* | Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja |
| *Kingsfield, Peat, Marwick, Goerdeller (KPMG)* | Siddharta dan Widjaja |
| *Price Waterhouse Coopers (PWC)* | Haryanto, Sahari dan rekan |

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan KAP dimana jika laporan keuangan perusahaan pertambangan diaudit oleh KAP *Big Four* yaitu *Deloitte & Touche, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers* dan KPMG diberi kode 1 sedangkan apabila perusahaan diaudit oleh KAP *Non Big Four* maka diberi kode 0 [42]:

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Kualitas audit = KAP *Big Four* (1), KAP *Non Big Four* (0) (2.5)

### 2.1.3.Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia [25].

Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu [43].

Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika dilihat satu sisi saja. Angka-angka ini akan menjadi lebih berarti apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu [44].

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil [45] .

Para *stakeholders* (pemegang saham) perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan uang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan laba rugi dan neraca [46].

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah [47] :

1. Perbedaan letak perusahaan dengan tingkat harga dan biaya operasi yang berbeda-beda, seperti besar kecilnya perusahaan
2. Jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan yang digunakan dalam operasi mungkin berbeda dengan perusahaan yang lain

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

3. Adanya perbedaan umur kekayaan yang dimiliki di antara perusahaan-perusahaan tersebut
4. Perbedaan kebijaksanaan yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan baik dalam menaksir umur kegunaan suatu aktiva tetap, metode depresiasi dan metode penilaiannya
5. Perbedaan struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan
6. Perbedaan sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan termasuk perbedaan dalam klasifikasi biaya, klasifikasi rekening dalam penyajian laporan keuangan serta periode akuntansi (tahun buku). Manfaat kinerja keuangan untuk mendukung dan memberi infomasi bagi pihak manajemen sebagai salah satu sumber dalam pengambilan keputusan.

Tujuan analisis kinerja keuangan adalah [48] :

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
2. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Indikator kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (tingkat pengembalian aset). *Return On Asset* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

Indikator *Return On Asset* adalah [48]:

$$\textit{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \text{ X } 100\% \qquad (2.6)$$

### 2.1.4.Manajemen Laba

Manajemen laba adalah memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya [49]. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan [50].

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode [51]. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan memberi kesan tertentu atau memengaruhi tindakan *stakeholders* yang bergantung pada laporan keuangan tersebut [52].

Laporan keuangan yang salah saji karena disengaja atau ceroboh, sehingga menyesatkan, tidak akurat, dan tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, merupakan kecurangan pada investor. Jenis paling umum dari kecurangan laporan keuangan melibatkan kelebihan pernyataan pendapatan dan laba, serta terlalu rendahnya biaya, sehingga dapat menggelembungkan kemampulabaan (kemampuan perusahaan menghasilkan laba) atau meminimalkan kerugian dari suatu entitas. Salah saji tersebut juga mengakibatkan kelebihan aktiva dan terlalu rendahnya kewajiban. Penipuan tersebut juga dikenal sebagai penipuan inklusif karena laporan keuangan meliputi transaksi atau nilai-nilai yang salah [53].

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah [50] :

1. Motivasi bonus
2. Motivasi kontrak
3. Motivasi politik
4. Motivasi pajak
5. Pergantian *chief executive officers*
6. *Initial public offerings*
7. Mengkomunikasikan informasi ke investor.

Manfaat manajemen laba adalah harga sahamnya bagus, integritas manajer tetap terjaga dan kredibilitas perusahaan di mata publik tetap baik. Sedangkan tujuan dari dilakukannya manajemen laba adalah untuk menyesatkan pihak lain yang ingin mengetahui dan menilai kinerja dan kondisi perusahaan [50].

Tujuan utama manajemen laba adalah menurunkan variabilitas laba sepanjang beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode baik dan buruk, antara periode berjalan dan masa depan, atau berbagai kombinasinya [51].

*Modified Jones model* (MJM) dikembangkan oleh Dechow dan kawan-kawan

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

(1995). Model ini muncul untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam *Jones model* (JM). Menurut Dechow dan kawan-kawan,kelemahan JM adalah secara implisit berasumsi bahwa diskresi manajemen tidak dilakukan terhadap pendapatan. Padahal,telah disebutkan sebelumnya bahwa pendapatan tidak sepenuhnya terlepas dari usaha manipulasi. Jika pengelola perusahaan ternyata melakukan manipulasi melalui pendapatan, JM menjadi bias.

Dechow lalu mengembangkan MJM dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi dalam penjualan kredit pada periode berjalan meerupakan objek manipulasi laba sehingga dirinya memperbaiki JM dengan menghilangkan variabel perubahan piutang dari variabel perubahan pendapatan untuk mengestimasi akrual nondiskresioner pada saat periode kejadian.

Secara teknis,penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dalam MJM hampir sama dengan JM. Perbedaannya hanya terletak pada penentuan NDA. Dalam MJM,penentuan NDA telah memasukkan unsur perubahan piutang dan perubahan pendapatan utuk mengestimasi NDA.

Secara detail, dengan MJM, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dapat dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (2.7)$$

2. Menentukan nilai parameter α1, α2, dan α3 dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.8)$$

Lalu untuk menskalakan data, semua variabel tersebut dibagi dengan aset tahun sebelumnya ($A_{it-1}$) sehingga formulasinya berubah menjadi:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it1}) + \varepsilon_{it} \quad (2.9)$$

3. Menghitung nilai akrual nondiskresioner (NDA) dengan formulasi:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit}/A_{it-1} - \Delta R_{ecit}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it}) \quad (2.10)$$

4. Menentukan nilai akrual diskresioner dengan menggunakan formulasi :

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it} \quad (2.11)$$

Keterangan:

$TA_{it}$ = Total akrual perusahaan I dalam periode t

$NI_{it}$ = Laba bersih perusahaan I pada periode t

$CFO_{it}$ = Arus kas operasi perusahaan I pada periode t

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

$NDA_{it}$ = Akrual nondiskresioner perusahaan I pada periode t

$DA_{it}$ = Akrual diskresioner perusahaan I pada periode t

$A_{it-1}$ = Total aset perusahaan I pada periode t-1

$\Delta R_{evit}$ = Perubahan penjualan bersih perusahaan I pada periode t

$\Delta R_{ecit}$ = Perubahan Piutang perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$ = *Property, plant, equipment* perusahaan I pada periode t

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,$= Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi

$\varepsilon_{it}$ = *Error term* perusahaan I pada periode t : [54]

## 2.2. Review Peneliti Terdahulu

Penelitian terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responcibility*sudah banyak dilakukan dan hasil penelitiannya juga beragam. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yaitu :

a. Penelitian dengan judul "Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responcibility* (CSR)". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive* diperoleh sampel sebanyak 107. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan kualitas audit.Secara simultan kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan secara parsial kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR [8] .

b. Penelitian dengan judul "Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance*terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang tercatat (*GoPublic*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2008 sebanyak 139 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 89 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR,sedangkan variabel independen yang digunakan adalah

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

*Earning management*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan *profile*. Secara simultan manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan *profile* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.Secara parsial ukuran dewan komisaris dan *profile* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan *earning management*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR [55] .

c. Penelitian dengan judul "Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014".Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen dan komite audit. Secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.Secara parsial komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [11].

d. Penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Studi Pada Bank Di Indonesia Periode Tahun 2007-2008)". Populasi penelitian ini adalah seluruh bank domestik di Indonesia yang beroperasi periode 2007-2008. Penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam peneltian ini sebanyak 226 perbankan. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kinerja keuangan.Secara simultan kinerja keuangan yang terdiri dari rasio *Size*, ROA, dan *Leverage* berpengaruh terhadap CSR perbankan di Indonesia periode 2007-2008.Secara parsial *Size* dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap CSR [15].

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

e. Penelitian dengan judul "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, penelitian ini mendapatkan sampel 68 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusi,kepemilikan manajemen,kepemilikan asing,ukuran perusahaan dan proporsi dewan komisaris. Secara simultan kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR [10].

**Tabel 2.3 Review Peneliti Terdahulu**

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang diperoleh |
|---|---|---|---|
| Imannuel Wiryawan Dan Martinus Budiantara (2011) | Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responcibility* (CSR) | Variabel Dependen: pengungkapan CSR<br>Variabel Independen : Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit | Secara simultan : kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.<br>Secara parsial : kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.3 Sambungan**

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|---|---|---|
| Muhammad Titan Tergazhi (2012) | Pengaruh *earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Variabel Dependen : pengungkapan CSR<br><br>Variabel Independen: *Earning management*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan *profile* | Secara simultan : Manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan *profile* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.<br>Secara parsial : Ukuran dewan komisaris dan *profile* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan *earning management*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR |
| Siti Fatimah, Makhdalena dan Fenny Trisnawati (2015) | Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 | Variabel Dependen: pengungkapan CSR<br><br>Variabel Independen: Komisaris independen dan komite audit | Secara simultan : Komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.<br>Secara parsial : Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. |
| Bramantya Adhi Cahya (2011) | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Studi Pada Bank Di Indonesia Periode Tahun 2007-2008) | Variabel Dependen: pengungkapan CSR<br><br>Variabel Independen: Kinerja keuang | Secara simultan : Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio *Size*, ROA, dan *Leverage* berpengaruh terhadap CSR perbankan di Indonesia periode 2007-2008<br>Secara parsial : *Size* dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap CSR. |

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**Tabel 2.3 Sambungan**

| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang Diperoleh |
|---|---|---|---|
| Rr. Wulan Wahyuningtyas dan Yeterina Widi Nugrahanti (2012) | Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* | Variabel Dependen : Pengungkapan CSR<br>Variabel Independen : kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan proporsi dewan Komisaris | Secara simultan : Kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.<br>Secara parsial : Kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. |

## 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

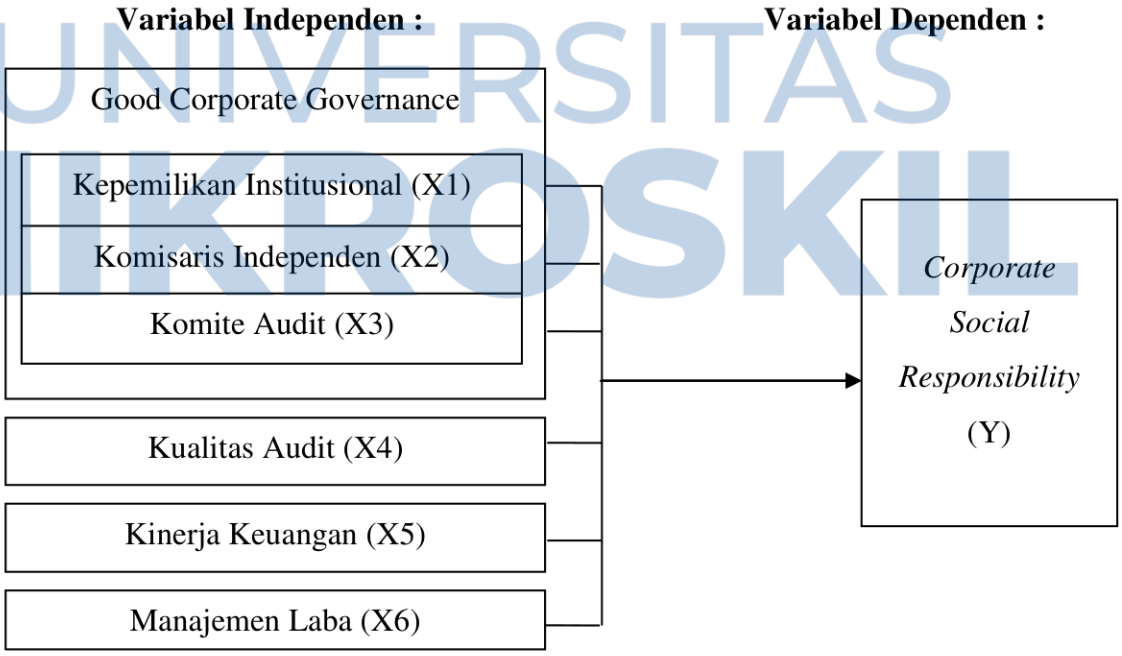


**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Dari gambar kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bahwa Variabel dependen yang digunakan adalah *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel Independen yang digunakan adalah *good corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit), kualitas audit, kinerja keuangan, dan manajemen laba.

**2.4. Pengembangan Hipotesis**

a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain).Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan. Pertumbuhan yang dominan dari kepemilikan institusional di pasar modal mencerminkan konsentrasi dan kenaikkan kekayaan oleh investor institusional [6]. Sehingga keputusan investor institusional dalam pasar modal berdampak pada nilai saham perusahaan. Investor institusional melihat keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*.

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR [7].Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_1$ : Kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility***

b. Pengaruh komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility*

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi diharapkan dapat melakukan kegiatan monitoring dengan baik agar dapat meminimalkan perilaku manajemen laba. Disamping itu, komisaris independen juga bertanggungjawab mewujudkan *Good Corporate Governance* yang dapat mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan [56]. Pelaksanaan dan pengungkapan CSR merupakan penerapan dari asas GCG yaitu *responsibility* dan *transparency* yang mengatur perusahaan untuk peduli pada kehidupan sosial dan lingkungan dengan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Terlaksananya CSR akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan dengan terciptanya hubungan yang baik dengan *stakeholder* yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan [57].

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh komisaris independen terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap CSR [11]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_2$ : Komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility***

c. Pengaruh komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility*

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap pihak manajemen. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan akan menambah efektivitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan CSR [58].

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh komite audit terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap CSR [11]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

**$H_3$ : Komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility***

d. Pengaruh kualitas audit terhadap *Corporate Social Responsibility*

Tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat *public relation* perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR [2]. Kualitas audit sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pihak eksternal akan laporan keuangan suatu perusahaan termasuk investor. Sehingga semakin tinggi kualitas audit maka akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pelaporan CSR.

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh kualitas audit terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap CSR [8].Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_4$ : Kualitas audit terhadap *Corporate Social Responsibility***

e. Pengaruh kinerja keuangan terhadap *Corporate Social Responsibility*

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibel untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Dengan semakin tingginya tingkat profitabilitas, maka semakin besar pula pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengungkapannya [59].Tingkat profitabilitas dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan cenderung semakin luas [60].

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap CSR [16].

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_5$ : Kinerja keuangan terhadap *Corporate Social Responsibility***

f. Pengaruh manajemen laba terhadap *Corporate Social Responsibility*

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya, tindakan tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba. Kegiatan CSR ini digunakan oleh manajer sebagai alat pelindung. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi pendapatan (manajemen laba) menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial ini sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* [61].Manajemen laba menanggung risiko tertentu untuk prospek masa depan perusahaan, dan *outsider* (investor dan *stakeholder*) akan mengambil tindakan disipliner terhadap manajer jika manajemen laba substansial terdeteksi. Dari titik pandang manajer, CSR adalah sinyal yang mengalihkan perhatian pemegang saham dari masalah yang mungkin menghukum manajer [62].

Pada peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh manajemen laba terhadap CSR mendapatkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap CSR [21]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_6$ : Manajemen laba terhadap *Corporate Social Responsibility***

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.